



Baseline Kasus Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Desa Sambungrejo 2017

Rizky Rahmawaty¹, Dila Athika Sari², Zahra³, Soraya Wardani Putri⁴, Wahyu Mulyo Sejati⁵

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: rizky.rahmawaty@students.untidar.ac.id,
dila.athika.sari@students.untidar.ac.id, soraya.wardani.putri@students.untidar.ac.id,
zahra@students.untidar.ac.id, wahyu.mulyo.sejati@students.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the handling of flash floods and landslides in Sambungrejo Village, Magelang Regency, with a focus on post-disaster aid distribution and the level of institutional preparedness from a gender perspective. The study used a qualitative descriptive approach through interviews with village officials and affected communities, field observations, and a review of disaster documents. The research analysis was based on the Gender and Disasters theory developed by the World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM). The results indicate that although victim data collection was conducted based on gender and age group, this information was not optimally utilized in aid planning and distribution. The assistance provided tended to be general and poorly coordinated, resulting in the unmet needs of women, children, and vulnerable groups. Furthermore, the absence of village disaster institutions prior to the disaster, such as DESTANA and OPRB, resulted in low preparedness, delayed evacuation processes, and limited protection for vulnerable groups. The gender perspective in this study shows that women are at a higher level of vulnerability due to their domestic roles, limited mobility, and limited access to information in emergency situations. The findings emphasize the importance of strengthening gender analysis, utilizing disaggregated data, and enhancing village institutional capacity to support more inclusive and equitable disaster management.

Keywords: Gender Equality, Aid, Disaster

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Sambungrejo, Kabupaten Magelang, dengan menitikberatkan pada distribusi bantuan pascabencana dan tingkat kesiapsiagaan kelembagaan dari sudut pandang gender. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan aparat desa dan masyarakat terdampak, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen kebencanaan. Analisis penelitian mengacu pada teori Gender and Disasters yang dikembangkan oleh World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendataan korban telah dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, informasi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dalam perencanaan maupun penyaluran bantuan. Bantuan yang diberikan cenderung bersifat umum dan kurang terkoordinasi sehingga kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan belum terpenuhi secara optimal. Selain itu,

belum terbentuknya kelembagaan kebencanaan desa sebelum bencana, seperti DESTANA dan OPRB berdampak pada rendahnya kesiapsiagaan, keterlambatan proses evakuasi, serta terbatasnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Perspektif gender dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan berada pada tingkat kerentanan yang lebih tinggi akibat peran domestik, keterbatasan mobilitas, dan minimnya akses informasi dalam situasi darurat. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya penguatan analisis gender, pemanfaatan data terpilah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan desa guna mendukung penanganan bencana yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kesenjangan gender, Bantuan, Bencana

PENDAHULUAN

Bencana menurut International Strategy for Disaster Reduction (2004) dalam (Nakoe & Lalu, 2022) adalah peristiwa yang mengganggu fungsi kehidupan masyarakat dan menyebabkan dampak besar pada kehidupan manusia, perekonomian, dan lingkungan, yang melampaui kemampuan masyarakat untuk merespons dengan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021, terdapat delapan kategori bencana yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Magelang yaitu kekeringan, gempa bumi, cuaca ekstrem, erupsi, kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, dan banjir bandang.

Salah satu bencana besar yang terjadi di Kabupaten Magelang adalah banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Desa Sambungrejo, Kecamatan Grabag, pada Sabtu, 29 April 2017 sekitar pukul 15.00 (Kompas.id, 2017). BPBD Kabupaten Magelang menyatakan banjir bandang tersebut terjadi akibat curah hujan sangat deras yang mengguyur daerah perbukitan kaki Gunung Andong dan Telomoyo selama beberapa hari sehingga memicu longsor dan membentuk bendungan alami yang akhirnya jebol dan memicu banjir bandang (Kompas.com, 2017). Penanganan bencana ini melibatkan seluruh unsur mulai dari TNI, POLRI, BPBD Magelang, Boyolali, Klaten, Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Basarnas Semarang, belasan komunitas relawan Magelang, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang, dan unsur terkait lainnya (Magelangkab, 2017). Terdapat 10 sektor utama yang menjadi fokus penanganan, yaitu posko bencana yang dikoordinasi BPBD Magelang, logistik, kesehatan, evakuasi, transportasi, keamanan, barak, pendidikan, informasi, dan ekonomi (Magelangkab 2017). Hal ini bertujuan untuk memastikan koordinasi dan layanan yang efektif bagi masyarakat terdampak.

Dalam fase tanggap darurat, distribusi bantuan menjadi salah satu aspek krusial dalam penanganan bencana. Informasi dari Bapak Purwanto, Sekretaris Desa Sambungrejo menyatakan bahwa selama kejadian distribusi bantuan makanan dilakukan secara merata tanpa membedakan kelompok rentan. Namun demikian, efektivitas distribusi bantuan mengalami kendala karena masyarakat terdampak tidak terpusat disatu lokasi pengungsian, melainkan memilih bertahan atau mengungsi secara mandiri di rumah saudara. Kondisi tersebut menyebabkan bantuan tidak dapat didistribusikan secara optimal dan terkontrol, meskipun posko utama telah disiapkan di Balai Desa dan dapur umum ditempatkan di beberapa titik yang berlokasi tidak jauh dari area terdampak (Magelangkab, 2017). Selain itu, pada

saat bencana tahun 2017, Desa Sambungrejo belum memiliki kelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana). Kondisi ini menyebabkan kesiapsiagaan masyarakat masih terbatas, belum tersedianya jalur evakuasi yang jelas, serta rendahnya pemahaman warga terkait langkah penyelamatan diri saat bencana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Sambungrejo telah menerapkan pendekatan penanggulangan bencana yang responsif gender, khususnya dalam aspek distribusi bantuan serta kapasitas kelembagaan kebencanaan desa dalam mendukung kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

Tinjauan pustaka ini diarahkan untuk mengkaji dua aspek utama, yakni distribusi bantuan pasca bencana berbasis gender serta kesiapsiagaan kelembagaan kebencanaan melalui DESTANA dan OPRB, dengan menggunakan teori Gender and Disasters yang dikembangkan oleh World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM) sebagai kerangka analisis utama. WADEM menegaskan bahwa bencana tidak bersifat netral terhadap gender, melainkan menghasilkan dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan sebagai konsekuensi dari konstruksi peran sosial, relasi kekuasaan, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya dan proses pengambilan keputusan.

Dalam perspektif WADEM, ketimpangan distribusi bantuan pasca bencana kerap bersumber dari kegagalan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok rentan. Pola distribusi bantuan yang bersifat seragam berpotensi mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Perempuan umumnya menghadapi kerentanan berlapis akibat tanggung jawab domestik, keterbatasan mobilitas, serta rendahnya akses terhadap informasi dan layanan pascabencana. Penggunaan data terpilah menjadi elemen kunci dalam merancang mekanisme distribusi bantuan yang adil, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan berbasis gender. WADEM juga menekankan bahwa kesiapsiagaan kelembagaan merupakan faktor penentu dalam efektivitas respons bencana yang berperspektif gender. Ketidadaan atau lemahnya struktur kelembagaan seperti DESTANA dan OPRB dapat menyebabkan penanganan bencana berlangsung secara spontan dan tidak terkoordinasi, sehingga meningkatkan tingkat kerentanan kelompok perempuan. Norma gender yang menempatkan perempuan pada peran pengasuhan serta kecenderungan untuk menunggu arahan dalam situasi darurat memperbesar risiko keterlambatan evakuasi, terutama ketika tidak didukung oleh sistem peringatan dini dan jalur evakuasi yang memadai.

Lebih lanjut, rendahnya keterwakilan perempuan dalam kelembagaan kebencanaan membatasi integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dominasi laki-laki dalam struktur OPRB merefleksikan kuatnya norma gender tradisional yang masih memposisikan penanggulangan bencana sebagai ranah maskulin, sehingga berpotensi menghambat perumusan kebijakan kebencanaan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Penekanan pada penggunaan Teori menurut WADEM membuka ruang bagi evaluasi kebijakan dan praktik penanggulangan bencana di tingkat desa. Kebijakan tersebut bisa mengurangi kendala akses dan kerentanan struktural dengan

memastikan bantuan yang peka terhadap gender dan budaya, meningkatkan partisipasi semua kelompok dalam pengambilan keputusan pemulihan, serta melindungi hak-hak kelompok rentan dalam konteks darurat Banjir Bandang dan Tanah Longsor

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam permasalahan distribusi bantuan logistik dan kelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana) dalam penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Sambungrejo tahun 2017. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu menjelaskan secara kontekstual dinamika distribusi bantuan dan koordinasi kelembagaan dalam satu wilayah terdampak bencana secara spesifik, sebagaimana digunakan dalam penelitian pengelolaan bantuan logistik bencana di tingkat daerah (Nasrullah et al., 2021). Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan di wilayah terdampak bencana serta wawancara mendalam dengan Sekretaris Desa Sambungrejo, BPBD Kabupaten Magelang dan warga terdampak yang terlibat atau mengalami langsung proses distribusi bantuan dan pengungsian. Wawancara difokuskan pada pola pengungsian masyarakat, mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan, serta peran kelembagaan desa dalam koordinasi penanganan bencana. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa laporan BPBD Kabupaten Magelang, pemberitaan media daring, dan jurnal yang relevan.

Analisis ini membandingkan kondisi di lapangan dengan kerangka teori Disaster and Emergency Management yang dikembangkan oleh World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM). Teori ini digunakan untuk menelaah distribusi bantuan dan kelembagaan penanggulangan bencana dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kebencanaan. Analisis difokuskan pada pengaruh ketiadaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok rentan dalam distribusi bantuan akibat tidak terpusatnya masyarakat pascabencana, serta lemahnya kelembagaan kebencanaan terhadap efektivitas distribusi bantuan dan kesiapsiagaan masyarakat yang berdampak secara berbeda pada kelompok rentan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sambungrejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Secara administratif, desa ini terdiri atas lima dusun yaitu Dusun Sambungrejo, Dusun Nipis, Dusun Karanglo, Dusun Pringapus, dan Dusun Sidorejo. Berdasarkan data lapangan, tiga dusun yang terdampak langsung oleh bencana banjir bandang dan tanah longsor adalah Dusun Sambungrejo, Dusun Nipis, dan Dusun Karanglo. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Magelang jumlah keseluruhan penduduk pada ketiga dusun terdampak tercatat sebanyak 187 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia menunjukkan bahwa Dusun Sambungrejo memiliki 24 penduduk laki-laki, 22 penduduk perempuan, dan 12 anak-anak. Dusun Nipis terdiri atas 56 laki-laki, 44 perempuan, dan 9 anak-anak sedangkan Dusun Karanglo memiliki 21 penduduk laki-laki, 20

perempuan, dan 11 anak-anak. Bencana banjir bandang dan tanah longsor tersebut menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang cukup besar.

Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Magelang, terdapat 13 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, serta 17 rumah mengalami kerusakan berat dan 9 rumah mengalami kerusakan ringan. Secara demografis, ketiga dusun menunjukkan komposisi penduduk yang relatif beragam. Dusun Nipis memiliki proporsi laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan sedangkan Dusun Sambungrejo dan Karanglo memperlihatkan komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berimplikasi terhadap perbedaan tingkat kerentanan, kapasitas adaptasi, dan akses terhadap bantuan pasca bencana.



Sumber: BPBD Kabupaten Magelang

Pemilahan Data dan Pendistribusian Bantuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas distribusi bantuan masih terhambat karena masyarakat tidak difokuskan di satu titik pengungsian. Warga lebih memilih tinggal sementara di rumah saudara sehingga tidak terdapat pemusatan pengungsi di satu lokasi yang memudahkan pendataan dan koordinasi. Kondisi ini menyebabkan proses pendataan kebutuhan menjadi lambat, petugas kesulitan menjangkau seluruh warga terdampak, dan distribusi bantuan sering kali tidak tepat sasaran. Ketidakterpusatannya warga membuat mekanisme distribusi yang seharusnya dapat dilakukan secara terkoordinasi menjadi terpecah-pecah sehingga bantuan logistik maupun kebutuhan spesifik berbasis gender tidak dapat disalurkan secara optimal.

Untuk menindaklanjuti persoalan distribusi bantuan yang tidak terkoordinasi tersebut, aspek pendataan seharusnya menjadi instrumen kunci dalam memastikan ketepatan sasaran dan pemenuhan kebutuhan penyintas. Namun, dalam praktiknya proses pendataan yang dilakukan masih belum mampu menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Informasi yang dikumpulkan tidak digunakan untuk membedakan kebutuhan dalam pendistribusian bantuan. Sistem pendataan dalam distribusi bantuan bencana juga belum disusun secara terpilah berdasarkan jenis kelamin maupun kategori kelompok rentan. Akibatnya, proses distribusi bantuan terutama bantuan makanan

masih dilakukan secara umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik antara laki-laki, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lain.

Distribusi logistik untuk rumah warga yang akses jalannya terputus akibat bencana dilakukan dengan sistem pukol rata berupa sembako seperti beras, telur, dan mie instan yang diberikan seminggu sekali secara tidak rutin. Salah satu ibu rumah tangga, P (40), menegaskan bahwa “saya hanya diberi sembako dan itupun tidak rutin.”. Sementara itu, warga dengan tingkat kerusakan rumah paling parah hanya menerima bantuan makanan siap saji tanpa pembedaan kebutuhan khusus berdasarkan gender maupun kelompok rentan. Selain itu, kebutuhan penunjang lainnya seperti pakaian maupun kebutuhan domestik perempuan tidak disalurkan secara langsung oleh pihak penanggung jawab. Warga harus mengajukan permintaan secara mandiri kepada pengelola bantuan. S (43) menyatakan, “Kalau mau minta pakaian dan semacamnya harus datang langsung ke posko.”

Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan mekanisme penyaluran yang responsif terhadap kebutuhan spesifik berdasarkan gender dan kondisi sosial ekonomi. Meskipun demikian, terdapat perhatian khusus terhadap kelompok anak-anak, terutama dalam aspek pendidikan. Pemerintah desa dan pihak terkait memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah dan dukungan terhadap fasilitas pendidikan yang terdampak banjir bandang. Upaya ini menunjukkan adanya bentuk respons terhadap kebutuhan kelompok usia tertentu meskipun belum sepenuhnya berbasis analisis gender yang menyeluruh.

Sementara itu, distribusi bantuan untuk perbaikan rumah mengalami kendala koordinasi. Bantuan bagi rumah yang mengalami kerusakan berat maupun ringan tidak terorganisir dengan baik. Penyaluran bantuan dilakukan secara terpisah oleh berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan donatur individu tanpa adanya sistem pendataan terpadu. S (43) menyatakan bahwa ketika ia kembali dari rumah sakit, bantuan memang terus berdatangan, namun tidak terorganisir dan tidak jelas berasal dari mana.

Akibatnya, penerima bantuan tidak mengetahui sumber bantuan yang mereka terima dan beberapa keluarga terdampak tidak memperoleh bantuan secara proporsional. Temuan ini memperkuat pandangan dalam teori Gender and Disaster bahwa ketiadaan data terpilah gender dan mekanisme koordinasi yang tepat dapat menimbulkan ketimpangan dalam proses distribusi bantuan. Situasi ini juga berpotensi mengabaikan kebutuhan kelompok perempuan, anak-anak, dan masyarakat dengan kerentanan sosial lainnya sehingga menghambat terwujudnya prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penanganan bencana.

Kondisi Kesiapsiagaan Bencana

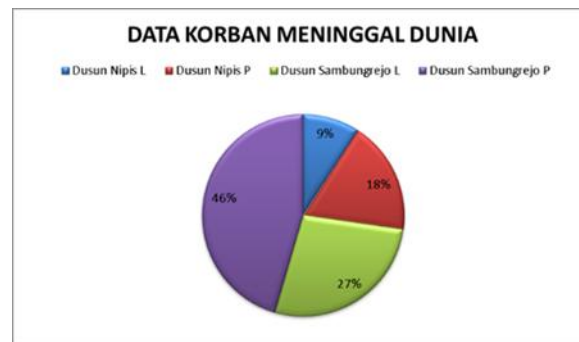
Merujuk pada World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM), respons bencana idealnya dilakukan dengan mempertimbangkan faktor gender, budaya, dan kerentanan sosial untuk memastikan bahwa penanganan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Namun demikian, temuan penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan antara prinsip tersebut dan praktik di lapangan. Pada saat bencana terjadi, Desa Tangguh Bencana (DESTANA) belum terbentuk sehingga instrumen dasar

manajemen risiko, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, pembagian peran relawan desa, dan mekanisme perlindungan kelompok rentan belum tersedia. Ketiadaan struktur formal ini berdampak langsung pada pola pengungsian masyarakat, yang kemudian cenderung bersifat spontan dan berbasis jaringan sosial keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purwanto, Sekretaris Desa Sambungrejo, bencana tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di desa tersebut dipicu oleh curah hujan berintensitas tinggi di kawasan perbukitan Pegunungan Andong dan Telomoyo. Hujan ekstrem ini menyebabkan runtuhnya tanah pada beberapa titik lereng yang kemudian menutup aliran sungai-sungai kecil di bagian hulu Dusun Sambungrejo dan Dusun Nipis hingga terbentuk bendungan alami. Timbunan material longsor tersebut menahan aliran air hujan hingga volumenya meningkat dan melebihi kapasitas resapan tanah. Ketika tekanan air mencapai titik maksimum bendungan alami tersebut jebol dan melepaskan aliran air yang membawa material batuan dan tanah dalam jumlah besar sehingga menghantam permukiman warga dan mengakibatkan banjir bandang sekaligus tanah longsor.

Sebelum bencana terjadi, kondisi lingkungan Desa Sambungrejo menunjukkan kualitas hulu Daerah Aliran Sungai yang cukup baik. Program penghijauan pada tahun 2009–2015 dinilai cukup berhasil dengan luas hutan rakyat mencapai sekitar 2.168 hektare atau 66% dari total wilayah Daerah Aliran Sungai (Detik News, 2017). Namun demikian, kondisi tersebut tidak cukup untuk menahan dampak cuaca ekstrem. Selain itu, Desa Sambungrejo belum memiliki program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebelum bencana tahun 2017. Ketiadaan kesiapsiagaan tersebut meliputi jalur evakuasi, titik kumpul, dan prosedur penanganan darurat yang menyebabkan proses evakuasi tidak terkoordinasi.

Dikutip dari WADEM, secara internasional angka kematian akibat bencana tercatat lebih tinggi pada perempuan dan anak-anak dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti ketimpangan akses terhadap informasi, sumber daya, dan kemampuan mobilitas. Kondisi tersebut semakin diperparah ketika perempuan tinggal di wilayah yang lebih rentan dengan tingkat keamanan rumah yang rendah serta akses ekonomi yang terbatas untuk beradaptasi atau menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Selain itu, peran gender yang dibentuk secara sosial, seperti kecenderungan perempuan menunggu arahan sebelum mengambil keputusan evakuasi serta besarnya tanggung jawab domestik dan dorongan emosional sebagai ibu yang memastikan kondisi aman anggota keluarga (anak-anak, orang tua, dan lansia) sering kali menghambat kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri secara cepat (Subiyakto, 2021). Kondisi tersebut membuat perempuan berada pada posisi kerentanan yang lebih tinggi dalam situasi darurat. Temuan ini tercermin pada kasus di Desa Sambungrejo, dimana data menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat bencana didominasi oleh perempuan yang mengindikasikan adanya ketimpangan kerentanan dan akses keselamatan selama proses evakuasi dan respons bencana.



Diolah dari data BPBD Kabupaten Magelang

Dari 3 dusun yang terlanda bencana banjir terbanyak korbannya adalah penduduk dusun Sambungrejo. Namun demikian, secara umum perempuan paling banyak menjadi korban banjir yaitu sebesar 7 orang dari 11 korban atau 64%. Sementara itu, korban laki-laki tercatat sebanyak 4 dari 11 orang atau 36%. Dari kedua dusun tersebut, terlihat bahwa persentase kematian pada kelompok perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok perempuan memiliki proporsi kematian yang relatif lebih besar pada kedua wilayah.

Dalam teori ini, peran dan ekspektasi sosial terhadap laki-laki dan perempuan umumnya dibentuk oleh konstruksi gender tradisional yang melekat dalam masyarakat. Perempuan secara sosial diharapkan mengambil peran dalam mengasuh dan merawat anggota keluarga, seperti anak-anak, serta memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari keluarga pada masa-masa sulit akibat bencana. Kemudian, laki-laki diposisikan sebagai pelindung keluarga dan masyarakat yang diharapkan menunjukkan sikap keberanian, ketegasan, serta kemampuan fisik dalam menghadapi situasi yang berisiko tinggi. Terlihat dari Pasca bencana, pemerintah desa membentuk Organisasi Pengurangan Risiko Bencana (OPRB) sebagai upaya memperkuat kapasitas respon bencana ditingkat lokal yang selanjutnya membentuk Destana (Desa Tangguh Bencana). Namun, proses pembentukan OPRB masih memperlihatkan ketimpangan gender yang nyata. OPRB memiliki 107 anggota yang terbagi dalam sembilan sektor penanggulangan bencana, dengan komposisi 89 laki-laki dan hanya 18 perempuan (Margono et al., 2019). Dominasi laki-laki ini mencerminkan kuatnya norma gender tradisional yang masih mengasosiasikan peran publik dan aktivitas fisik terutama dalam aspek tanggap darurat sebagai ranah laki-laki. Hal ini berdampak pada terbatasnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko bencana, padahal perempuan juga memiliki kebutuhan, pengalaman, serta kapasitas yang berbeda dan penting dalam manajemen bencana.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan BPBD Kabupaten Magelang menyatakan meskipun wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai zona bahaya dengan tingkat risiko tinggi dan beberapa titik masuk kategori zona merah yang tidak layak huni sebagian masyarakat tetap memilih bertahan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumarlin, keputusan tersebut dipengaruhi faktor ekonomi dan keterbatasan akses lahan. Beliau menyampaikan, "Sebenarnya saya

sudah tahu kalau disini tidak boleh didirikan rumah, tetapi sudah tidak ada tanah lain dan di sini sumber penghidupan saya". Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tetap tinggal di wilayah berisiko tinggi juga dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan keterbatasan pilihan.

Setelah Destana terbentuk, desa mulai memiliki Early Warning System (EWS) berupa sirine peringatan bencana yang dipasang di area atas dekat titik rawan. Sirine ini akan berbunyi ketika tanda-tanda bencana terdeteksi sehingga warga dapat segera menyelamatkan diri dan risiko korban jiwa dapat diminimalkan. Selain teknologi, masyarakat juga memanfaatkan EWS alami, seperti perilaku hewan misalnya monyet yang turun ke pemukiman saat merasakan perubahan lingkungan sebagai tanda dini terjadinya bencana.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Sambungrejo belum sepenuhnya menerapkan pendekatan penanggulangan bencana yang responsif gender. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendataan korban memang telah dilakukan, namun data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok rentan belum dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan maupun distribusi bantuan. Kondisi tersebut menyebabkan penyaluran bantuan masih bersifat umum dan kurang memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya. Di sisi lain, rendahnya kesiapsiagaan kelembagaan sebelum terbentuknya DESTANA dan OPRB menjadikan respons bencana berlangsung secara spontan dan minim koordinasi, yang berdampak pada meningkatnya kerentanan perempuan akibat keterbatasan mobilitas, tanggung jawab pengasuhan, serta akses yang terbatas terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan dalam situasi darurat.

Merujuk pada kerangka Gender and Disasters dari WADEM, hasil penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan dalam distribusi bantuan dan tingginya kerentanan perempuan tidak semata-mata dipicu oleh faktor alam, melainkan berkaitan erat dengan konstruksi sosial gender dan kapasitas kelembagaan kebencanaan ditingkat lokal. Penguatan pemanfaatan data terpilah berbasis gender serta peningkatan kapasitas kelembagaan kebencanaan desa menjadi aspek penting dalam mendorong penanganan bencana yang lebih adil, efektif, dan inklusif. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk menelaah strategi penguatan kelembagaan kebencanaan berbasis gender secara lebih mendalam serta mengidentifikasi praktik-praktik baik integrasi perspektif gender dalam sistem distribusi bantuan pascabencana di berbagai konteks wilayah.

DAFTAR RUJUKAN

Detik news. (2017, Mei 3). Banjir Magelang: Hutan Bagus, Longsoran di Hulu Bendung Sungai. From news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-3490958/banjir-magelang-hutan-bagus-longsoran-di-hulu-bendung-sungai?utm_source=chatgpt.com

-
- Kompas.com. (2017, Mei 1). Tewaskan 10 Orang, Ini Pemicu Banjir Bandang Magelang. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2017/05/01/00191501/tewaskan.10.orang.ini.pemicu.banjir.bandang.magelangetail/kabut-duka-menyelimuti-kabupaten-magelang-banjir-bandang-renggut-13-jiwa/1726>
- Kompas.id. (2017, April 30). Empat Tewas Diterjang Banjir Bandang. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/empat-tewas-diterjang-banjir-bandang/>
- Magelangkab. (2017, April 30). Kabut Duka Menyelimuti Kabupaten Magelang Banjir Bandang Renggut 13 Jiwa. Retrieved from [magelangkab.go.id: https://magelangkab.go.id/home/detail/kabut-duka-menyelimuti-kabupaten-magelang-banjir-bandang-renggut-13-jiwa/1726](https://magelangkab.go.id/home/detail/kabut-duka-menyelimuti-kabupaten-magelang-banjir-bandang-renggut-13-jiwa/1726)
- Margono, Mashar, R., & Khoirul, A. (2019). Upaya Peningkatan Kapasitas Organisasi Pengurangan Resiko Bencana (OPRB) Desa Sambungrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. *Jurnal ABM Mengabdi*, 6(2).
- Nakoe, M. R., & Lalu, N. A. S. (2022). Manajemen bencana. UD Duta Sablon.
- Nasrullah, Paripurno, E. T., & Prasetyo, J. D. (2021). Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana Banjir : Studi Kasus Tanggap Darurat Bencana Di Kota Kendari Tahun 2017. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 7.
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021
- Subiyakto, R. (2021). Partisipasi Perempuan Dalam Program Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Kalurahan Pengkok.
- WADEM. Gender and Disasters. Retrieved from [wadem.org: https://wadem.org/wp-content/uploads/2019/10/WADEM-PS-Gender-and-Disasters.pdf](https://wadem.org/wp-content/uploads/2019/10/WADEM-PS-Gender-and-Disasters.pdf)